

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota Bogor memiliki posisi strategis dan memiliki potensi untuk mengalami pengembangan pemukiman, ekonomi, pelayanan, dan pariwisata. Oleh karenanya, dibalik keindahan kota Bogor ini terdapat pemerintah daerah dengan perwakilan rakyat daerah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban ketiga perannya seperti membentuk peraturan daerah, membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan belanja daerah dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan belanja daerah. Akibatnya kota Bogor memiliki image yang positif dari banyak masyarakat karena keasriannya dibandingkan dengan kabupaten Bogor yang masih cenderung pasif secara praktik kehumasannya dalam mempublikasikan informasi. Walaupun begitu sebagian masyarakat juga masih banyak yang memiliki tingkat kepercayaan yang kurang terhadap adanya kinerja DPRD.

Rasa ketidakpercayaan masyarakat ini bermula dari berbuahnya hasil dan kerja-kerja dari kemunculan janji manis, tuntutan korupsi, perselingkuhan, surat kaleng dan masalah serius lainnya yang dialami oleh pemerintah. Tentunya berangkat dari hal itu, masyarakat juga tidak percaya terhadap lembaga

perwakilan yang sebagaimana seharusnya mampu menampung dan mewakili suara-suara rakyat. Ketika bahan bakar minyak naik, hal itu menjadi suatu alasan masyarakat untuk ramai-ramai datang dan menolak atas adanya kenaikan bahan bakar minyak. Tepat pada bulan September 2022, mahasiswa merobohkan gerbang gedung DPRD Kota Bogor sebagai bentuk ungkapan kekecewaannya terhadap ketidak hadirannya anggota DPRD dalam audiensi dan menerima aspirasi secara langsung agar menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dan dapat menyampaikannya kepada DPR pusat.

Sehubungan dengan banyak fenomena yang terjadi itulah mungkin memiliki banyak kaitannya yang harus dilakukan untuk menjaga agar citra DPRD Kota Bogor tidak dipandang buruk. Tentunya peran humas diperlukan sebagai bagian yang mengurus antar kepentingan internal dan eksternal terutama untuk mempublikasikan kinerja anggota DPRD yang berdampak pada masyarakat kota Bogor. Baik dalam fungsi lembaga perwakilan rakyat sebagai lembaga pengawasan, keuangan dan legislasi. Dan terdiri dari empat komisi yaitu Komisi I dalam bidang Pemerintahan dan Hukum, Komisi II dalam bidang Perekonomian dan Keuangan, Komisi III dalam Bidang Pembangunan dan Lingkungan, serta Komisi IV dalam bidang Kesejahteraan Rakyat. Komisi itulah yang berfungsi sebagai alat kelengkapan DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap kerja pemerintah yang juga bekerja sama dengan pemerintah dan juga melahirkan regulasi atau Undang Undang yang berkaitan dengan kesejahteraan

masyarakat kota Bogor. Dari komponen-komponen tersebut inilah yang akan berkolaborasi dalam menjaga citra DPRD sehingga mampu dinilai tetap positif diantara fenomena pandangan buruk masyarakat yang bersumber pada pemerintah pusat hingga daerah yang sering kali terjadi.

Dipihak lain humas yang melakukan upaya untuk melakukan dalam publikasi di media masa tentunya harus mampu memiliki kemampuan dan menyadari bahwa media pada zaman saat ini ialah menjadi fungsi paling *urgent* untuk medekati masyarakat. Mengingat bahwa pengguna media sosial di Indonesia terdapat 167 juta orang terhitung pada bulan Januari 2023. Dapat dilihat bahwa jumlahnya setara dengan 60,4% dari populasi di Indonesia.¹ Sama dengan upaya humas DPRD dalam mempublikasikan informasi melalui tiga media sosial aktif diantara YouTube, TikTok dan Instagram.

Agar komunikasi dapat dilakukan secara dua arah maka dari itu, humas memerlukan dukungan media sosial untuk mempublikasi aktivitas secara efisien dan menarik agar mampu membentuk citra positif. Dari banyaknya media sosial humas DPRD Kota Bogor berfikir untuk terus melakukan berbagai upaya bahwa masyarakat dan teknologi tidak dapat dipisahkan dan saling memiliki hubungan simbiosis dan bergantung satu sama lain sehingga humas perlu bergerak untuk melakukan publikasi melalui media sosial. yang berisi unggahan aktivitas dewan.

¹ <https://dataindonesia.id/Digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>

Berdasarkan hal itu, tanggapan masyarakat mengenai citra dan kinerja DPRD Kota Bogor terlihat transparan dan positif. Dalam ketiga akun officialnya, DPRD Kota Bogor memiliki jumlah diatas seribu pengikut sehingga dapat membuktikan bahwa apapun yang di publikasi melalui media sosialnya memiliki komentar yang cukup beragam ketika aktivitas DPRD di publikasikan.

Sehingga berdasarkan dengan pemaparan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Humas dan Protokol dalam membangun citra positif DPRD melalui publikasi dengan judul “Menjaga Citra Positif DPRD Melalui Publikasi Di Media Sosial (Studi pada Humas dan Protokol DPRD Kota Bogor)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Humas dan Protokol menjaga citra DPRD Kota Bogor melalui publikasi di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana dengan pokok permasalahan diatas, dengan adanya penelitian ini ialah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana Humas dan Protokol menjaga citra DPRD Kota Bogor melalui publikasi di media sosial?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya bagi ilmu hubungan masyarakat. Diharapkan berguna bagi penelitian sejenis di masa mendatang sebagai referensi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- Humas dan Protokol DPRD Kota Bogor untuk menggunakan media dan aplikasi yang tepat dalam mempublikasikan media untuk membentuk citra.
- Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bogor untuk mengkomunikasikan kegiatannya agar diketahui publik melalui akun @dprd.kotabogor.
- Masyarakat untuk mencari tahu apa saja yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bogor yang di publikasikan oleh Humaspro DPRD Kota Bogor melalui akun @dprd.kotabogor.